**EKSISTENSI PESANTREN DALAM TEKANAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA**

# (Telaah Atas Kebijakan Politik Sekolah Zending dan Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda)

**Fahruddin**

*Universitas PGRI Yogyakarta*

*Em*[*ail: fahruddin@upy.ac.id*](mailto:ail:%20fahruddin@upy.ac.id)

***Abstract:*** *This study is conducted due to the efforts of the Dutch East Indies Government to impose a policy of the Zending School and the Teacher's Ordinance to eliminate the existence of Pesantren. Therefore the objectives of this study are (1) to explain the existence of pesantren in facing the policy of the Dutch East Indies Government Zending School policy and (2) to explain the existence of pesantren in facing the politics of the Dutch East Indies Government Teacher Ordinance. The findings in the study are the policies of the Zending School experienced success in the initial period but failed in the next period. Then the teacher ordinance policy actually gave birth to the spirit of pesantren resistance against the Dutch East Indies government so that the Teacher Ordinance policy was repealed in 1928.*

**ملخص:** أجري هذا البحث بسبب جهود حكومة الهند الشرقية الهولندية في تحكيم سياسة مدرسة زنديغ وترسيم المعلمين لهدم وجود فسانترين.لذلك، غرض هذ البحث هو (1) بيان وجود فسانترين في مواجهة سياسة مدرسة زنديغ من حكومة الهند الشرقية الهولندية (2) بيان وجود فسانترين في مواجهة سياسة ترسيم المعلمين من حكومة الهند الشرقية الهولندية. نتائج هذا البحث هي أن سياسة مدرسة زنديغ نجاحًا في الفترة الأولى، لكنها فشلت في الفترة التالية. بل ثم ولدت سياسة ترسيم المعلمين روح مقاومة فسانترين ضد حكومة الهند الشرقية الهولندية حتى ألغيت سياسة ترسيم المعلمين في عام 1928.

***Abstrak:*** *Kegelisahan akademik dalam artikel ini adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Nusantara mengalami banyak tekanan pada masa Pemerintah Hindia Belanda melalui kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Maka rumusan masalah yang pertama akan menjelaskan kebijakan Sekolah Zending yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menyaingi pesantren. Rumusan masalah yang kedua akan menjelaskan kebijakan Ordonansi Guru untuk membatasi gerak bagi para sarjana pesantren dalam mengajarkan agama Islam. Dari rumusan masalah yang pertama menjelaskan bahwa usaha Pemerintah Hindia Belanda dengan memberikan subsidi keuangan yang besar untuk pendeta dan siswa sekolah zending mengalami keberhasilan diawal periode, namun mengalami kegagalan di periode selanjutnya. Sedangkan rumusan masalah yang kedua menjelaskan pemberlakuan persyaratan administrasi yang ketat sebelum menjalani kegiatan belajar, pelarangan kegiatan studi jika pesantren tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan justru melahirkan lebih banyak siswa yang berani menentang kolonialisme, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mencabut Ordonansi Guru pada tahun 1928.*

***Keywords:*** Pesantren*,* Sekolah Zending*,* Ordonansi Guru*.*

# PENDAHULUAN

Dalam pembahasan teori ilmu politik tidak asing lagi terdengar tokoh Antonio Gramsci, seorang pejuang gerakan sekaligus pemikir kritis dari Italia. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjumpai kondisi negaranya yang tidak stabil akibat adanya benturan antara rakyat dan pemerintah, antara penguasa dan yang dikuasai. Dari keadaan tersebut mendorong Gramsci untuk membuka mata melihat cara-cara yang digunakan para kaum borjuis untuk menundukkan kaum proletar, sehingga dia mencetuskan sebuah konsep hegemoni dan solidaritas organik.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang eksis hingga sekarang sejatinya tidak lekang dari rentetan sejarah masa yang menjumpainya. Pesantren menjadi banyak diminati dan mendapatkan kepercayaan besar bagi masyarakat untuk mempelajari syariat agama Islam seperti sekarang ini merupakan bentuk hasil dari pengalaman panjang dalam mengarungi pergantian masa demi masa di bumi nusantara ini. Awal perjuangan para Kyai memperkenalkan pesantren pada masa Hindu-Buddha mengalami banyak tantangan dari masyarakat lokal yang masih memberlakukan sistem kasta, masyarakat lokal menilai tidak sepatutnya masyarakat diberikan hak kebebasan mempelajari agamanya dengan tanpa batasan kelas sosial. Tidak jarang para Kyai harus berhadapan dengan kaum Brahmana dalam beradu argumentasi maupun kedigdayaan.

Perjuangan para Kyai dengan pesantrennya menemui babak baru yang lebih sulit ketika kedatangan bangsa kolonial Belanda. Tidak cukup dengan beradu argumentasi keagamaan untuk menghadapi bangsa yang sudah mengenal teknologi dan sistem politik yang sudah tertata. Bangsa kolonial Belanda yang datang pertama kali dengan kongsi dagangnya VOC, selain memiliki misi menguras sumber daya alam nusantara, seiring waktu juga memiliki misi untuk menguasai perpolitikan serta menyebarkan keyakinan Kristen di bumi nusantara. Salah satu bentuk usaha menyebarkan keyakinan Kristen setelah berhasil menguasai perpolitikan nusantara adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah Kristen.[[1]](#footnote-1) Beberapa di daerah sudah berdiri sekolah Kristen seperti di Ambon sebanyak 16 sekolah pada tahun 1632. Sebanyak 3 sekolah Kristen juga sudah berdiri di Jakarta pada tahun 1706. Pendirian sekolah-sekolah tersebut adalah untuk menghilangkan pengaruh Pendidikan agama Islam melalui penyebaran ajaran Kristen. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda memasukkan anak Belanda dan pribumi ke sekolah yang dirikannya untuk dijadikan pekerja yang kompeten pada VOC.

Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, ia mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dijadikan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Setiap daerah Keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tertulis “dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara”.

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya (Kerajaan Islam). Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak memberikan kepedulian untuk perkembangan pendidikan di Indonesia terutama Islam karena Belanda menganut agama Kristen dan bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Keadaan ini sangat wajar karena kolonial Belanda tidak akan bertahan lama jika agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi masalah tersebut Pemerintahan Hindia Belanda sangat berterima kasih kepada Christian Snouck Hurgronje yang secara sungguh-sungguh mendalami Islam. Salah satu nasehatnya kepada pemerintah Belanda ialah “pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi, berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi”.

Seluruh kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda secara khusus diarahkan untuk mengurangi dan mengalahkan pengaruh pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda beranggapan pendidikan Islam akan tergeserkan pengaruhnya ketika dihadapkan dengan model sekolah yang dibentuk sesuai kebutuhan zaman serta lekat dengan kebudayaan barat.[[2]](#footnote-2) Pada 1890, C. Snouck Hurgronje melaporkan data peningkatan persebaran pesantren dalam sepuluh tahun berikutnya, namun dia mengamati adanya perkembangan sekolah Kristen yang tampak lebih mendominasi. C. Snouck Hurgronje sebagai dewan pengarah kebijakan keagamaan dalam pemrintahan Hindia Belanda memiliki tujuan memodernisasikan Indonesia dengan gaya negara barat, bukan Indonesia dengan tradisi Islam.

Langkah politik yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menggeser pengaruh pesantren adalah melalui kebijakan Sekolah Zending dan Ordonansi Guru. Melalui penulisan ini, penulis akan menjelaskan dua kegijakan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tersebut. Untuk menjelaskannya, penulis mengacu pada beberapa literatur. Literatur tersebut antara lain: Arifin, *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama)*. Untung, *Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren.* Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial.* Dwikarwani, Bekti Utaminingsih., *Kehidupan Zending Gereformeerd di Surakarta (Studi Sejarah Sosial Budaya).* Muhammad Isa Anshory, *Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Mmisi Kristen.* Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*.Subroto, *Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara.* Anam, Choirul., *Pertumbuhan dan Perkembangan NU.* Farid Setiawan, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru*.Farid Setiawan, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Kolonial Belanda: 1911-1942.* Literatur diatas banyak mengungkap politik Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda untuk menggeser eksitensi pesantren di Nusantara.

Selain literatur diatas, penulis juga mengacu pada referensi lain seperti tulisan Baudet dan Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan.* Baudet dan Brugmans mengungkap data-data sekolah zending yang sudah didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Data mengenai Jumlah Sekolah Zending diperkuat dengan arsip yang terdapat di ANRI yaitu Staatsblad van Netherlandsh Indie Tahun 1938 Nomor 511. Penulis juga menggunakan literarur lain untuk menjabarkan politik Ordonansi Guru melalui koleksi arsip ANRI, Staatsblad 925 Nomor 219 tahun 1905 yang membuktikan bahwa Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan Ordonansi Guru dalam usaha menyikapi perkembangana pendidikan agama Islam.

# Kegelisahan akademik penulis dalam tulisan ini adalah mengapa Pemerintah Hindia Belanda menilai pesantren perlu untuk dihilangkan dengan memunculkan Sekolah Zending pada tahun 1900 dan ditekan melalui kebijakan Ordonansi Guru pada tahun 1900, padahal Pemerintah Hindia Belanda sudah mampu menguasai pemerintahan di Nusantara sejak tahun 1813. Berdasarkan hal diatas, rumusan masalah yang akan diungkap oleh penulis adalah: *pertama,* Bagaimanakah eksistensi pesantren saat diberlakukan politik Sekolah Zending oleh pemerintah Hindia Belanda?, *kedua,* Bagaimanakah sikap pesantren ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik Ordonansi Guru?. Tujuan dari rumusan masalah pertama adalah untuk mengungkap eksistensi Pendidikan pesantren ditengah pemberlakuan politik Sekolah Zending. Sedangkan tujuan dari rumusan masalah kedua adalah untuk mengetahui sikap kyai maupun santri menanggapi kebijakan Ordonansi Guru yang berusaha membatasi ruang gerak pesantren. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pemdekatan agama untuk menjelaskan pemikiran dan sikap ulama-ulama pesantren dalam menanggapi tekanan Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pendekatan budaya juga digunakan untuk memaparkan tradisi pendidikan tradisional yang berjalan di pesantren.

**EKSISTENSI PESANTREN DALAM INTERVENSI PEMERINTAH HINDIA BELANDA**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang selalu konsisten menyebarkan syariat Islam serta menentang terhadap bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda semenjak wilayah Indonesia di aneksasi olehnya. Pesantren melalui pengajian selalu menanamkan embrio patriotisme dan semangat keagamaan kepada para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren lahir sebagai *“training center”* dan *“cultural center”* yang dipercaya oleh rakyat pribumi yang memeluk agama Islam. Secara *de facto* Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menafikan peranan pesantren tersebut.[[3]](#footnote-3)

Penentangan pesantren terhadap Pemerintah Hindia Belanda merupakan bentuk usaha pesantren dalam menjaga identitas religio-kulturalnya dari usaha penetrasi sistem pendidikan sekuler yang dikenalkan oleh bangsa penjajah. Perlawanan yang dilakukan oleh pesantren melalui dua cara yakni secara sembunyi dan terbuka. Perlawanan secara sembunyi tampak melalui usaha pesantren selalu bersikap konservatif dan defensif dari segala bentuk kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan perlawanan secara terbuka diwujudkan melalui sikap nonkooperatif serta selalu mengobarkan semangat anti terhadap segala bentuk penjajahan.[[4]](#footnote-4) Usaha-usaha tersebut muncul sebagai tanggapan pesantren terhadap penguatan penetrasi budaya barat dan kebijakan intervensif yang dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat muslim pribumi.[[5]](#footnote-5)

Semangat rakyat pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bergelora di berbagai daerah sebagai bentuk respon atas supremasi Pemerintahan Hindia Belanda. Semangat tersebut memicu pesantren yang awalnya menentang secara sembunyi mulai berani menampakkan perlawanan secara terbuka. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran “protonasionalisme” di kalangan pesantren yang kemudian melahirkan kekuatan nasionalisme yang kuat sehingga fungsi pesantren yang semula sebagai lembaga pendidikan agama Islam telah menjadi *a center of anti-Dutch sentiment.*

Perjuangan kalangan santri tidak hanya bersinggungan dengan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga dengan kalangan nasionalis yang pro dengan Pemerintah Hindia Belanda. Banyak di antara kaum nasionalis tidak menyetujui perkembangan pendidikan yang di perjuangkan melalui pesantren.[[6]](#footnote-6) Seperti Gunawan Mangoenkoesumo pernah mengusulkan dalam Kongres Boedi Oetomo di Yogyakarta tahun 1930 untuk menyusun program pengawasan terhadap pesantren. Usulan ini kemudian ditolak oleh peserta kongres berkat pernyataan yang disampaikan oleh dr. Soetomo. dr. Soetomo menampilkan argemntasi-argumentasi yang menunjukkan sikap mendukung terhadap keberlangsungan pesantren.

Sutan Takdir Alisyahbana yang merupakan salah satu tokoh yang prokolonial telah menunjukkan sikap curiga terhadap pesantren. Takdir Alisyahbana banyak melontarkan kecaman keras terhadap polemik kebudayaan pesantren. Ia berpendapat bahwa “kembali ke pesantren berarti kembali kepada antiintelektualisme, antiindividualisme, antiegoisme, antimaterialistik”. Beberapa tokoh yang pribumi yang anti terhadap pesantren menyimpulkan jika pesantren diterapkan lagi di era modern, maka tradisi di Indonesia tidak akan maju, tradisi di Indonesia akan tetap menjadi tradisi yang penuh kebodohan.[[7]](#footnote-7)

Perdebatan mengenai pesantren dilakukan oleh kalangan yang selama ini dekat dengan dunia media, yang selama ini banyak membuat opini-opini publik. Bagi kalangan yang kontra terhadap pesantren seringkali melontarkan pendapat-pendapatnya melalui tulisan-tulisan kemudian disebarkan kepada rakyat umum. Bagi kalangan yang pro terhadap pesantren juga selalu melawan melalui argumentasi-argumentasi yang kuat dan mendasar melalui media pula. kalangan yang pro terhadap pesantren antara lain dr. Soetomo, dr.Wahidin Soedirohoesodo, Ki Hadjar Dewantara, dan Sutopo Adiseputro. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pesantren antara lain Sutan Takdir Alisyahbana, Notosoeroto dan Gunawan Mangunkusumo.[[8]](#footnote-8)

Sikap anti dan curiga terhadap pesantren sudah ada dalam benak dari setiap orang Belanda. Mereka membenci kaum muslimin karena memiliki kekhawatiran yang tinggi jika terjadi kemunculan kekuatan besar dari kaum muslimin di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda khawatir jika terjadi pemberontakan-pemberontakan seperti yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin pimpinan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825-1830. Snouck Hurgronje yang selalu mengamati perkembangan agama Islam di Indonesia menyatakan bahwa “perkembangan peribadatan masyarakat muslim tidak bisa hindari, maka masyarakat tetap dibebaskan untuk beribadah, tetapi yang perlu diawasi adalah pendidikannya. Sebab melalui pendidikan seperti pesantrenlah sikap anti kolonial akan diajarkan.”

Atas usulan Snouck Hurgronje, Pemerintahan Hindia Belanda membuat kebijakan yang khusus dibuat untuk melawan masyarakat pribumi dari kalangan pesantren. Kebijakan tersebut adalah memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Untuk bisa melakukan kebijakan tersebut, Pemerintahan Hindia Belanda perlu mengaktifkan masyarakat pribumi dari kalangan pemangku adat. Golongan pemangku adat yang masih memiliki tradisi leluhur diyakini akan menentang kalangan santri. Perbedaan tradisi antara masyarakat pribumi yang masih memegang tradisi nenek moyang dengan kalangan pesantren akan memudahkan usaha Pemerintahan Hindia Belanda dalam upaya menyempitkan gerakan kalangan muslimin.[[9]](#footnote-9)

# Pemerintahan Hindia Belanda mulai menjalin hubungan yang erat dengan golongan priyai. Snouck Hurgronje membentuk komunikasi yang baik dengan kalangan priyai melalui kerjasama kebudayaan Indonesia-Belanda. Pamongpraja menjadi pihak yang dituju oleh Snouck Hurgronje untuk selalu diajak bekerjasama melawan gerakan Islamisasi. Pemerintahan Hindia Belanda mendidik anak-anak dari kalangan priyai dengan pendidikat barat. Pendidikan yang diberikan tidak diarahkan untuk melatih berpikir bebas dan berkeinginan untuk merdeka, tetapi Pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk melindungi adat dan sebagai instrument untuk melawan gerakan kalangan santri.

# KEBIJAKAN ZENDING

Semenjak diberlakukannya Politik Etis, Pemerintahan Hindia Belanda mulai memperkuat pengaruhnya melalui kebijakan-kebijakan di bidang Pendidikan. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda ditujukan untuk kepentingan kekuasaan kolonialisasi negara Belanda di Nusantara dan mengupayakan intervensi terhadap pendidikan selain yang dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda, salah satunya adalah pesantren. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh para Kyai sudah dikenal oleh Pemerintahan Hindia Belanda sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan untuk jihad melawan penjajah. Oleh karena alasan tersebut Pemerintahan Hindia Belanda tidak hanya berusaha menguras seluruh aset sumber daya alam nusantara saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama Kristen.

Pemerintahan Hindia Belanda bekerja sama dengan organisasi pekabaran Injil *Zending Govermeerd* untuk melakukan pekabaran Injil melalui Lembaga Pendidikan. Pemberian izin atas pendirian sekolah-sekolah Kristen semakin memperjelas bahwa Pemerintahan Hindia Belanda semakin terbuka terhadap kegiatan kristenisasi di Nusantara. Pemerintahan Hindia Belanda menyusun kurikulum yang terbaik demi kelancaran penyebaran sekolah-sekolah agar dapat menarik banyak peserta didik dari kalangan ningrat maupun rakyat biasa.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat pribumi. Atas dasar itulah maka para penginjil mengambil celah tersebut guna melancarkan kristenisasi di Hindia Belanda. Untuk menjalankan misinya para penginjil diberikan pendidikan terlebih dahulu. Para penginjil tersebut terhimpun dalam organisasi NZV atau *Nederlansh Zendeling Vereeniging*. Pada awalnya mereka bukanlah seorang guru, tapi seorang pastor. Setelah ada pembagian tugas, para Zendeling ini kemudian dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan agama Kristen dan ilmu pekabaran Injil yang lainnya.[[10]](#footnote-10)

Gereja-gereja Kristen bergabung dengan masyarakat misionaris, sehingga Zending yang datang k eke Jawa dipimpin oleh Zending Gofermeerd. Gereja-gerja yang ada di Jawa terikat dengan gereja-gereja yang ada di Belanda, begitu pula Zending.[[11]](#footnote-11) Ijin untuk mendirikan sekolah Kristen di Jawa seperti yang terjadi di Surakarta diprakarsai oleh Van Andel dan rekan-rekannya melalui kelompok yang telah mereka bentuk yakni *“Vereniging tot Oprichting en Istandhoyding van Christelyke Schoolen en Internaten te Surakarta”* yang dirapatkan pada tanggal 25 Juli 1916 di Surakarta. Permohonan mereka diajukan kepada Gubernur Jendral di Hindia Belanda atas sepengetahuan Residen Surakarta.[[12]](#footnote-12)

Sekolah Kristen yang dibangun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang diperuntukan secara khusus untuk anak-anak Eropa dan untuk anak-anak masyarakat pribumi.kurikulum yang diberlakukan selain mengenalkan ajaran-ajaran keyakinan Kristen juga memperkenalkan kebudayaan barat seperti cara berkomunikasi, makan, pakaian, pergaulan dan lain sebagainya. Bahasa Belanda dijadikan pelajar pokok di setiap jenjang sekolah. Bahasa Belanda juga digunakan dalam komunikasi keseharian dengan guru dan pergaulan antar sesama siswa. Asrama untuk tempat tinggal wajib bagi guru dan siswa juga disediakan dan Bahasa Belanda harus diitrapkan dalam kesehariannya. Aturan-aturan tersebut diarahkan supaya masyarakat para siswa mengenal dengan maksimal budaya-budaya barat dan meninggalkan budaya-budaya lokal. Selain itu, Sekolah Zending juga memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi para alumni di berbagai bidang.[[13]](#footnote-13)

Tujuan utama dari sekolah Zending adalah menyebarkan ajaran kepercayaan agama Kristen. Sekolah ini juga dibantu dana oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam operasioalnya. Pemerintah Hindia Belanda selalu mendukung pengembangan sekolah Zending. Kemajuan dengan cepat dapat disaksikan di beberapa daerah seperti di Surakarta. Pada tahun 1930 di Surakarta sudah berdiri 20 sekolah Zending yang tersebar di Margoyudan, Villapark (dekat Pasar Legi), Sidokare, Jebres, Kerten, Gemblegan, Danukusuman, Kawatan, Gilingan dan Manahan.[[14]](#footnote-14) Persebaran pembangunan sekolah ini juga diatur dengan baik agar dibangun di tempat yang dekat dengan pesantren dengan tujuan agar mampu menarik minat warga muslim sekitar untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

# Diskriminasi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda mulai tampak setelah beberapa sekolah Kristen telah berdiri. Pemerintah Hindia Belanda memberikan subsidi untuk operasional sekolah-sekolah Kristen. Seluruh kebutuhan operasional mampu tercukupi memalui dana subsudu tersebut. Berbeda dengan sekolah yang berbasis agama Islam seperti pesantren, Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak memberikan bantuan dana kepada lembaga tersebut. Subsidi tetap diberikan kepada sekolah Islam yang bukan pesantren yakni sekolah-sekolah swasta yang didirikan masyarakat pribumi muslim, namun subsidi yang diterima sangat sedikit jika dibanding dengan yang diterima oleh sekolah Kristen.

Daftar subsidi yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda

kepada sekolah Kristen dan Islam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Sekolah Kristen** | **Sekolah Islam** |
| 1936 | f 686.100,- | f 7.500,- |
| 1937 | f 686.200,- | f 7.500,- |
| 1938 | f 696.100,- | f 7.500,- |
| 1939 | f 844.000,- | f 7.600,- |

# Sumber: Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hlm 188.

Subsidi untuk Kristen sebesar f 696.100,- pada tahun 1938 terdiri dari biaya personal sebanyak f 633.200,- dan biaya perlengkapan sebanyak f 62.900,-. rincian biaya personal meliputi gaji dan tunjangan khusus untuk pendeta sebanyak f 598.000,-, tunjangan penugasan dan anak sebanyak f 15.900,-, tunjangan untuk kepentingan dinas sebanyak f 7.000,- dan biaya personal lain sebanyak f 12.300,-. Adapun rincian biaya perlengkapan meliputi biaya pelatihan sebanyak f 900,-, biaya perawatan medis siswa-siswa sebanyak f 300,-, biaya perawatan kantor Dewan Gereja sebanyak f 900,-, biaya telegram pemerintah daerah sebanyak f 800,-, dan biaya perjalanan dan tempat tinggal sebanyak f 60.000,-.[[15]](#footnote-15)

Data subsidi tersebut menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Hindia Belanda terhadap sekolah-sekolah Kristen daripada sekolah-sekolah Islam swasta. Tidak terdapat data yang menunjukkan pemberian subsidi Pemerintah Hindia Belanda terhadap pesantren. Pemerintah Hindia Belanda telah memantau sekolah-sekolah Islam swasta yang dianggap tidak memberikan dampak besar terhadap perkembangan gerakan yang lebih baik terhadap siswa dan masyarakat. Pesantren dipantau secara khusus oleh Pemerintah Hindia Belanda karena sejak awal Pemerintah Hindia Belanda ingin menghilangkan lembaga yang dipimpin oleh Kyai tersebut, salah satunya melalui tidak memberikan subsidi kepada pesantren agar pesantren tidak mampu berkembang sehingga masyarakat lebih percaya kepada sekolah Islam lainnya atau sekolah Kristen yang tampak semakin berkembang.

Pesantren dalam desakan kebijakan Zending tetap menjaga konsistensi tradisi keilmuwan agamanya. Para Kyai menyadari atas upaya Pemerintah Hindia Belanda melalui program sekolah Zending. Meskipun pesantren tidak berkembang secepat sekolah Zending, Para Kyai tidak henti-hentinya mengajarkan kepada para santri untuk tetap menjaga kehormatan agama Islam dan selalu memupuk jiwa patriotisme kebangsaan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menyadari akan keteguhan para Kyai dalam memperjuangkan lembaga pesantrennya dan upaya keteguhannya dalam memunculkan bibit patriotisme para santri, oleh karena hal tersebut program Zending tetap dilaksanakan hingga berhenti setelah pengaruh Jepang datang ke Indonesia.

**ORDONANSI GURU**

Tertera dalam Staatsblad 925 Nomor 219 tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan Ordonansi Guru tentang pengajaran agama Islam. Kebijakan Ordonansi Guru diberlakukan melalui Ispektoral Pendidikan Pribumi dengan tujuan membatasi ruang gerak para Kyai di pesantren dan guru agama di sekolah swasta. Kebijakan muncul atas prakarsa Snouck Hurgronje untuk mengatur sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Ordonansi guru yang pertama kali dikeluarkan pada 1905 dengan mewajibkan bagi setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melakukan pengajaran agama.[[16]](#footnote-16)

Ordonansi guru pada 1905 ini, dinyatakan berlaku untuk Jawa Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Isi dari ordonansi guru ini antara lain:

1. Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
2. Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
3. Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
4. Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.
5. Guru agama Islam bisa dihukum kurang maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa diperiksa oleh yang berwenang.
6. Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

Bagi lembaga pendidikan yang memiliki manajemen administrasi yang baik, tuntutan kebijakan Ordonansi Guru dapat dilaksanakan dengan baik, Tetapi bagi lembaga pendidikan yang belum memiliki sistem manajemen administrasi yang baik tuntutan kebijakan Ordonansi Guru sulit untuk dipenuhi. Selain itu, banyak di antara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.[[17]](#footnote-17) Kebijakan ini tentu saja menghambat praktik pembelajaran setiap harinya karena Kyai dan Ustadz harus membuat perizinan yang prosesnya tidak mudah. Para Kyai dan Ustadz saat itu melihat kebijakan ini sebagai upaya menghambat perkembangan pembelajaran agama Islam. Apalagi Ordonansi Guru juga ditujukan oleh Belanda kepada tokoh agama dan para guru agama yang selama ini menentang pemerintahan kolonial.[[18]](#footnote-18)

Ordonansi kedua dikeluarkan pada tahun 1925, kebijakan ordonansi pada tahun ini disusun dengan lebih mempersempit gerak pendidikan Islam.[[19]](#footnote-19) Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan tidak semua Kyai dan Ustadz diperbolehkan memberikan pengajaran agama Islam. Menanggapi kebijakan tersebut KH. Hasyim Asy’ari sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng menunjukkan sikap menentang terhadap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. KH. Hasyim Asy’ari bersama ulama pesantren di daerah Jawa dan Madura mendorong agar kebijakan ordonansi tersebut dihapus. Gerakan penentangan tersebut juga terjadi di Sumatra yang dipimpin oleh ulama-ulama pesantren.[[20]](#footnote-20)

Gerakan perlawanan dari para Kyai pesantren tidak pernah surut, kebijakan Ordonansi Guru telah dipatuhi oleh beberapa lembaga pendidikan yang memang sudah tertata secara administratif seperti Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Muhammadiyah yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan.[[21]](#footnote-21) Berbeda bagi ulama-ulama pesantren yang teguh berpendirian bahwa kebijakan tersebut hanya bentuk politik Pemerintah Hindia Belanda dalam usaha menghilangkan tradisi keilmuan agama Islam serta berupaya agar peran ulama sudah tidak dipandang oleh masyarakat. Pesantren tetap menjalani kegiatan pengajian seperti biasanya dengan tanpa menghiraukan aturan-aturan Ordonansi Guru. Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda mencabut kebijakan Ordonansi Guru karena dianggap pesantren tidak surut semangat melalui usaha tersebut. Pesantren mampu menunjukkan keberanian dalam menentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, justru penekanan demi penekaan semakin menambah semangat jihad para Kyai dan santri hingga penajajahan Belanda usai setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

**PENUTUP**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang lahir sejak awal masuknya agama Islam di nusantara hingga kini masih eksis dan semakin berkembang. Perkembangan tersebut diraih melalui perjuangan para ulama-ulama pesantren yang selalu gigih dalam menentang segala bentuk tekanan Pemerintah Hindia Belanda. Pesantren yang diyakini oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga yang melahirkan bibit-bibit perlawanan dianggap membahayakan. Oleh karena alasan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan sekolah zending dan Ordonansi Guru. Kedua kebijakan tersebut dinilai sebagai cara yang terbaik dengan memunculkan persaingan pendidikan Kristen serta membatasi ruang gerak para ulama-ulama pesantren. Namun kedua kebijakan tersebut tidak menyurutkan semangat para ulama pesantren untuk selalu mengupayakan eksistensi pesantren. Penentangan para ulama melalui selalu istiqomah mengajarkan ilmu syariat Islam dengan tanpa menghiraukan segala kebijakan Sekolah Zending dan Ordonansi Guru telah berhasil menunjukkan kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam usahanya hingga kebijakan Ordonansi Guru dicabut pada tahun 1928.

# DAFTAR RUJUKAN

Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS.

Arifin, H.M.. t.t. *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama).* Semarang: CV. Toha Putra.

Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU.* Surabaya: Aksara Mulia.

Anshory, Muhammad Isa. 2013. *Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Mmisi Kristen*. Karanganyar: Pustaka Lir-ilir. Staatsblad van Netherlandsh Indie Tahun 1938 no.511, Koleksi ANRI.

Aprilia, Anisatul Khoir. 2017. Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945, *SKRIPSI*. Jember: Universitas Jember.

Baso, Ahmad. 2012. *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka Afid.

Baso, Ahmad. 2017. *Al-Jabiri, Eropa dan Kita, 2 ed*. Tangerang: Pustaka Afid.

Baudet, H. dan I.J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: YOI.

Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang.* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Besluit Gubernur Jendral di HIndia Belanda kepada Pendeta utusan di Surakarta tertanggal 25 Juli 1916.

Djumhur, I dan Danasuparta, H. 1976. *Sejarah Pendidikan.* Bandung: CV. Ilmu.

Dwikarwani, Bekti Utaminingsih. 1998. Kehidupan *Zending Gereformeerd* di Surakarta (Studi Sejarah Sosial Budaya). *SKRIPSI.* Solo: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Farid Setiawan. Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru. *Jurnal Pendidikan Islam,* Volume 3, Nomer 1 Juni 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2013.Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Kolonial Belanda: 1911-1942. *Tesis.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Natsir, Ahmad. Identitas Poskolonialisme Pesantren Modern. *Cendekia*, Vol. 17, No. 2, Juli - Desember 2019.

Soetarman. 2003. *Dari Musa dan segala Nabi.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Subroto, K. Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara. *SYAMINA,* Edisi 1 / Januari 2017.

Untung, Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.

1. Djumhur, I dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV Ilmu, 1976), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-1)
2. Benda, Harry J*., Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. terjemahan Daniel Dhakidae. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1985), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-2)
3. Arifin, H.M.. t.t., *Kapita Selecta Pendidikan (Umum dan Agama)*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 104. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arif, Mahmud., *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 177-178. [↑](#footnote-ref-4)
5. Untung, Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, Vol. 11, No. 1, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Baso*, op cit,* 40. [↑](#footnote-ref-6)
7. Baso, *op cit,* 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. Baso, Ahmad., *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*, (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), hlm. 17-45. [↑](#footnote-ref-8)
9. Untung, Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soetarman, *Dari Musa dan segala Nabi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm 38-39. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dwikarwani, Bekti Utaminingsih., Kehidupan Zending Gereformeerddi Surakarta (Studi Sejarah Sosial Budaya), *Skripsi,* Solo: Universitas Negeri Sebelas Maret, 1998), hlm 61. [↑](#footnote-ref-11)
12. Besluit Gubernur Jendral di Hindia Belanda kepada Pendeta utusan di Surakarta tertanggal 25 Juli 1916. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dwikawarni, *op cit*, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-13)
14. H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta: YOI, 1987), hlm. 362. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anshory, Muhammad Isa., *Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Mmisi Kristen*, (Karanganyar: Pustaka Lir-Ilir, 2013), hlm. 154-155. Lihat juga Staatsblad van Netherlandsh Indie Tahun 1938 no.511, Koleksi ANRI. [↑](#footnote-ref-15)
16. Suminto, Aqib., *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 51-52. [↑](#footnote-ref-16)
17. Subroto, K., Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara, *SYAMINA,* Edisi 1/Januari 2017, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-17)
18. Anam, Choirul., *Pertumbuhan dan Perkembangan NU,* (Surabaya: Aksara Mulia, 2010), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-18)
19. Farid Setiawan, Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru, *Jurnal Pendidikan Islam,* Volume 3, Nomer 1 Juni 2014, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-19)
20. Aprilia, Anisatul Khoir., Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945, *Skripsi,* (Universitas Jember: Jember, 2017), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-20)
21. Farid Setiawan, Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Kolonial Belanda: 1911-1942, *Tesis,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 332-480. [↑](#footnote-ref-21)